



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Serangan Bertubi-tubi, Akhirnya Menyerah

Resmi Hentikan Sementara Proyek Revitalisasi Monas

JAKARTA—Desakan penghentian revitalisasi kawasan Monumen Nasional semakin kuat. Mulai dari netizen di Twitter, serangan dari Ketua DPRD DKI, hingga Istana Negara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahkan sempat ogah menanggapi protes netizen tentang penggundulan sisi selatan kawasan Monas. Anies sempat menyebutnya hanya ramai di Twitter saja.

Tapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya resmi menghentikan proyek revitalisasi Monas. Keputusan tersebut diambil setelah Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Setelah rapat dan tadi kita koordinasi dengan DPRD, ya sudah dihentikan sementara," kata Sekretaris DKI Jakarta Saefullah, Selasa (28/1/2020). Menurut Saefullah, sebenarnya pihaknya lebih suka meneruskan proyek revitalisasi tersebut. "Tapi karena ada hasil rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan untuk sementara. Untuk menghargai ini semua. Dan kita menunggu dari Mensesneg sebagai Ketua Komite," ujarnya.

Dikatakan, Pemprov DKI akan menunda proyek revitalisasi kawasan Monas sampai mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Komisi Pengarah terdiri dari tujuh instansi, termasuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Komisi Pengarah diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara.

"Kami menunggu dari Kemensetneg untuk menunda sampai dirapatkan," kata dia. Namun, Saefullah belum bisa memastikan waktu penghentian sementara revitalisasi Monas. Keputusan penghentian sementara bergantung pada rekomendasi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. "Kami tunggu kebijakan dari Pak Ketua Dewan kalau memang harus dihentikan dengan segala konsekuensinya, ya nanti bukan saya juga yang berhenti karena yang berkontrak Dinas Cipta Karya sebagai penanggung jawab anggaran," ucap Saefullah.

Sementara itu, Prasetio merekomendasikan penghentian semen-

tara kawasan Monas mulai Rabu (29/1/2020). Proyek itu dihentikan sementara sampai ada surat persetujuan dari Kemensetneg. "Mulai besok, menunggu surat dari Kementerian Sekretariat Negara," tutur Prasetio di area revitalisasi Monas.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (27/1/2020). Di lokasi, Pras mencecar pengelola Monas yang mendampinginya.

"Itu pohonnya diapain?" tanya Pras di lokasi. "Ada yang dipindahkan, ada yang ditebang," jawab Kepala Seksi Pelayanan Informasi UPK Monas Irfal Guci. Namun, Pras tak percaya jika semua pohon dipindahkan. Ia meyakini, sebagian pohon terutama yang berukuran besar telah ditebang.

"Tapi pohon besar itu tidak mungkin dipindahkan, pasti ditebang," kata dia. Mengenai masalah pohon-pohon yang ditebang, Irfal berkelit di wilayah sisi selatan atau yang sebagian adalah IRTI memang tidak tumbuh banyak pohon. "Ini sebagian IRTI jadi sebenarnya tidak ada pohon juga," ucap Irfal.

Pras juga bingung karena hingga kini revitalisasi masih terus berjalan meski sempat diminta diberhentikan oleh Komisi D DPRD DKI. "Ini enggak diberhentikan (revitalisasinya). Tolong dihentikan ya ini. Saya ketua DPRD," tegas Pras.

Mendengar hal tersebut, Irfal dan perwakilan UPK Monas hanya terdiam tanpa berkata-kata. Pras memang melihat proyek revitalisasi terus berlanjut. Tampak sejumlah pekerja sibuk berkerja. Ada yang menggali maupun mengebor. Beton telah dicor dan dipasang dengan ukuran yang cukup besar. Alasan proyek tak dihentikan Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan proyek revitalisasi Monas meskipun belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Pemprov DKI Jakarta merasa terikat kontrak dengan kontraktor pemenang tender, PT Bahana Prima Nusantara.

Prasetio mengaku kecewa dengan proyek revitalisasi Monas. Dia menyebut revitalisasi ini bukan untuk menata Monas. "Ini kan bukan menata. Pohon dipotong-potong, lalu ada yang dipindahkan juga. Kalau dipindahkan masih hidup ya enggak masalah. Dan pohon ini juga sudah puluhan tahun ditanam di sini," kata Pras.

Menurutnya, semula Pemprov DKI meminta anggaran untuk menata dan mempercantik Monas, sehingga DPRD DKI mendukung. Namun setelah melihat langsung kondisi Monas, Prasetio menyebut di luar dugaannya. "Saya langsung turun ke lapangan, saya langsung melihat revitalisasi Monas yang saya anggarkan kok beda dengan pemikiran saya," ucap dia.

"Awalnya konsepnya memperbaiki, membuat bagus, penataan," tuturnya. Prasetio menuturkan jika tahu Monas diperlakukan seperti itu, dia tak akan menyetujui anggaran revitalisasi monas.

"Saya pikir Monas daerah ring satu, daerah penyerapan dan di tata ruang RTRA-nya ini ruang hijau ko dibuat seperti ini. Kalau adanya seperti ini pasti enggak akan saya kasih," ujarnya.

Prasetio kemudian menyinggung soal genangan air di pintu Monas. Seperti diketahui, area pintu Monas sempat tergenang air imbas hujan yang mengguyur wilayah Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu. "Baru kemarin saya dengar, saya lihat, saya membaca di media sosial bahwa Sekda datang ke Setneg. Jadi jangan main salah-salahan, ini kita sedang kondisi ke depan sampai Februari itu banjir. Gimana serapan kita? Sekarang Monas sudah banjir," tandas dia.

Pihak Istana Kepresidenan akan menyurati Pemerintah Provinsi DKI untuk meminta penghentian sementara revitalisasi kawasan Monas. Hal ini dilakukan karena revitalisasi tersebut belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk distop dulu," kata Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pratikno. Pratikno meminta Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas). Penghentian berlaku hingga proyek pengembangan itu mendapat persetujuan, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995. (dni)